
Pendampingan tatakelola Badan Usaha Milik Desa Maju bersama Pusuk Lestari kabupaten Lombok Barat

Siti Atikah, Saipul A. Muhsyaf, Susi R. Cahyaningtyas, Rahmi S. Ramadhani

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Penulis korespondensi : Siti Atikah

E-mail : siti.atikah@unram.ac.id

Diterima: 26 Januari 2024 | Direvisi: 06 Februari 2024 | Disetujui: 06 Februari 2024 | © Penulis 2024

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa “Maju Bersama Desa Pusuk Lestari” (selanjutnya disebut BUMDesa MBDPL) dalam lima tahun terakhir mengalami hambatan dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya. Salah satu faktor hambatan diduga ketiadaan dokumen tatakelola keuangannya. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mendampingi BUMDesa MBDPL dalam menyusun kebijakan maupun peraturan dalam tatakelola keuangan BUMDesa. Tersedianya dokumen-dokumen tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas BUMDesa di masa yang akan datang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah (a) diskusi atau wawancara; (b) Penyusunan dokumen kebijakan. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 7 Juli dan 8 September 2022. Berdasarkan hasil diskusi, tim merancang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai bahan dasar merancang pedoman operasional baku untuk tugas pokok dan fungsi pengelola dan karyawan BUMDesa, pedoman kebijakan akuntansi dan bagan akun untuk penyusunan laporan keuangan. Rancangan dokumen tatakelola ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan operasional layanan BUMDesa di periode berikutnya. Kegiatan ini bermanfaat dalam meningkatkan tatakelola dan layanan BUMDesa di periode berikutnya.

Kata kunci: kebijakan akuntansi; tata kelola; bagan akun; Badan Usaha Milik Desa.

Abstract

The Village-Owned enterprise "Maju Bersama Desa Pusuk Lestari" (also known as BUMDesa MBDPL) is undergoing a restructuring process to encourage progress and independence. The organization has had some ups and downs in its operational activities. Therefore, to assist BUMDesa MBDPL in formulating policies and regulations for financial management, this service activity aims to provide policy documents. These documents are essential to ensure transparency and accountability in BUMDesa's financial management in the future. The team collected data by conducting discussions, interviews, and preparing policy documents on July 7 and September 8, 2022. Based on the results of the discussions, the team developed standard operational guidelines for internal control procedures. These guidelines are intended to assist BUMDesa managers and employees with their tasks and functions and provide accounting policy guidelines and charts of accounts to prepare financial reports. The draft governance document produced in this activity can be used to implement BUMDesa services in the future.

Keywords: accounting policy; chart of accounts; corporate governance; village-owned enterprises.

PENDAHULUAN

Tatakelola perusahaan yang baik sudah harus diterapkan oleh Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disebut BUMDesa) dikelola untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa (Astuti et al., 2019; Atikah et al., 2019; Pratiwi & Novianty, 2020; Rosyadi, Setyoko, et al., 2021). Perjalanan untuk mencapai cita-cita desa tidak mudah dan menghadapi banyak rintangan, baik dari sisi internal maupun eksternal organisasi (Astuti et al., 2019; Pratiwi & Novianty, 2020; Rosyadi, Setyoko, et al., 2021). Untuk itu diperlukan percepatan penguatan tatakelola BUMDesa.

Penataan kembali pengelolaan organisasi BUMDesa “Maju Bersama Desa Pusuk Lestari” (selanjutnya disebut BUMDesa MBDPL) diharapkan dapat mendorong kemandirian dan kemajuan BUMDesa. BUMDesa MBDPL telah mengalami pasang surut dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Pada tahun 2020 dan 2021, kegiatan operasional terhenti sementara waktu karena bencana alam dan perbaikan fasilitas jalan raya. Terdapat beberapa permasalahan tatakelola BUMDesa yang dapat diidentifikasi, yakni; partisipasi pengurus yang rendah, kapasitas pengelola dalam mengelola aset dan modal yang lemah, penerapan pengendalian internal juga lemah, perencanaan yang tidak memadai, hambatan aspek legalitas serta lemahnya pengetahuan mengenai pengembangan bisnis di sektor publik (Arista, 2021; Astuti et al., 2019; Maab, 2018; Rosyadi, Setyoko, et al., 2021). Keberhasilan BUMDesa salah satunya, didorong oleh adanya strategi yang tepat yang diputuskan oleh pengelola. Tidak hanya sebatas studi banding atau mencontoh dari kesuksesan BUMDesa tertentu, namun harus diiringi dengan perencanaan yang tepat sesuai dengan kondisi setempat. Astuti et al. (2019) dan Rosyadi, Ramadhanti, et al. (2021) memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan partisipasi pengurus melalui perencanaan usaha yang sesuai kebutuhan pengurus, penyusunan pengendalian internal yang memadai dan penyusunan regulasi yang memadai.

BUMDesa MBDPL belum memiliki dokumen kebijakan yang dapat mendukung tatakelola perusahaan yang baik.. Menyediakan dokumen kebijakan terkait pengelolaan aset dan modal BUMDesa sangat penting dilaksanakan (Atikah et al., 2019; Maab, 2018; Rosyadi, Ramadhanti, et al., 2021). Tersedianya dokumen-dokumen tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas BUMDesa di masa yang akan datang. BUMDesa MBDPL pernah mengalami hambatan dalam kegiatan operasionalnya. BUMDesa memiliki potensi usaha pendukung pariwisata yang dapat dikembangkan, sehingga mampu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mendampingi BUMDesa MBDPL dalam menyusun kebijakan maupun peraturan dalam tatakelola keuangan BUMDesa.

METODE

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan pembelajaran orang dewasa. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a) Diskusi dan wawancara. Tim kegiatan melibatkan pengelola BUMDesa MBDPL dalam diskusi (lihat gambar 1). Metode ini juga digunakan oleh Pratiwi & Novianty (2020). Tim mempertanyakan kegiatan yang telah berjalan serta dokumen lainnya, seperti laporan-laporan yang telah tersedia. Hasil dari diskusi atau wawancara ini digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai tugas individu, dokumen yang tersedia serta memperkirakan waktu yang digunakan dalam setiap jenis kegiatan. Selain berdiskusi dengan pengelola BUMDesa MBDPL, tim melakukan wawancara dengan Kepala Desa atau yang mewakili. Hal ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai potensi tatakelola BUMDesa, struktur organisasi BUMDesa, dan sebagainya. Berdasarkan hasil diskusi atau wawancara, tim dapat memberikan usulan pedoman kebijakan akuntansi maupun pedoman operasional baku khususnya bidang keuangan.
- b) Dokumentasi, sebagaimana dilakukan oleh Pratiwi & Novianty (2020). Pendekatan dokumentasi dilakukan untuk menyusun dokumen kebijakan. Kegiatan ini dilakukan tim melalui proses penelusuran dokumen serta didukung dengan diskusi antar anggota tim. Selain untuk melihat

potensi ekonomi desa, dokumentasi untuk mendukung penentuan metode kebijakan akuntansi dan pedoman operasional baku terpilih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di BUMDesa MBDL dilaksanakan pada tanggal 7 Juli dan 8 September 2022. Diskusi dilaksanakan dalam suasana yang kekeluargaan sebagaimana tampak pada gambar 1. Pada pertemuan pertama, diskusi dengan pihak pengurus BUMDesa membahas sejarah pendirian BUMDesa MBDPL, pengurus terpilih dan unit usaha yang didirikan, serta gambaran tugas pokok dari pengurus terpilih.



Gambar 1. Kegiatan diskusi dengan pengurus BUMDesa MBDPL

BUMDesa MBDPL terletak di desa Pusuk Lestari Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. Memiliki luas wilayah sebesar 642,60 Ha, desa Pusuk Lestari dikelilingi oleh area hutan lindung dan perkebunan (576,60 Ha). Hasil produksi perkebunan, pertanian dan hutan antara lain; durian, duku, nangka, rambutan, melinjo, gula enau, bambu dan madu (Millenium R et al., 2022; Rido et al., 2019). Selain dari hasil produksi tanaman hutan dan perkebunan, desa ini memiliki keindahan alam yang dapat digunakan untuk kegiatan berolah raga (bersepeda, jalan santai), berwisata serta belajar mengenai tumbuhan dan hewan. Ditinjau dari faktor alam tersebut, desa Pusuk Lestari ditetapkan sebagai desa wisata alam berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Barat nomor 41 tahun 2016 dan telah diubah dengan Peraturan Bupati nomor 17 Tahun 2020.

BUMDesa didirikan sebagai wadah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Atikah et al., 2019; Prihatin et al., 2018). BUMDesa bertujuan untuk meningkatkan ekonomi desa dengan cara menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dan mengelolanya secara professional dalam suatu badan usaha yang terpisah kekayaannya, namun tetap memiliki ciri khas desa (Prihatin et al., 2018; Sukasmanto, 2014). Sebagai contoh BUMDesa Mattiro Bulu di desa Bonto Tiro yang memiliki usaha simpan pinjam yang khusus melayani perempuan desa yang memiliki usaha kecil di rumah (Sukasmanto, 2014), atau unit usaha penyewaan tenda dan kursi serta jasa salon (Atikah et al., 2019). Tujuan-tujuan ini pula yang ingin dicapai oleh BUMDesa MBDPL diawal pendiriannya, melalui salah satu kegiatan khusus, yakni unit pengolahan air bersih.

BUMDesa MBDPL telah mengalami pasang-surut kehidupan berorganisasi. Pada tahun 2017 dan 2018, BUMDesa ini mengalami ketiadaan kegiatan operasional. Pada masa tersebut, pengelola BUMDesa telah mengelola unit pengelolaan air bersih dan memberikan pelatihan-pelatihan untuk pengolahan gula aren (Rido et al., 2019). Semangat untuk menggerakkan perekonomian desa melalui BUMDesa MBDPL kembali digaungkan, melalui musyawarah masyarakat dengan pemerintah desa. Keinginan ini seiring dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa serta dipicu dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 21 tahun 2016 pasal 9 yang menyatakan salah satu prioritas dalam pemanfaatan dana desa adalah pendirian dan pengembangan BUMDesa (Prihatin et al., 2018). Hasil musyawarah BUMDesa MBDPL adalah terpilihnya pengurus baru pada tahun 2019 (Rido et al., 2019).

BUMDesa sejatinya didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang merupakan prakarsa masyarakat desa (Prihatin et al., 2018). Artinya, kegiatan utama yang dipilih atau memberikan nilai tambah harus ditentukan oleh keinginan masyarakat sendiri. Termasuk keinginan untuk maju dan berkembang. Berdasarkan laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik yang

dilaksanakan oleh tim Rido et al. (2019) disebutkan bahwa sebelum pelaksanaan pemilihan pengurus baru, telah dilakukan survey potensi desa. Survey ini bertujuan untuk menentukan kegiatan utama BUMDesa MBDPL sehingga bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakat sebagai salah satu *stakeholder*. Hasil survey antara lain air terjun Alat-Alat dan Goa Alat-Alat yang terletak di Dusun Batu Penyu, agrowisata durian di dusun Kedondong Bawaq, serta hasil hutan dan perkebunan yang belum dikelola menjadi produk yang lebih bernilai, seperti pengolahan Nangka dan melinjo menjadi kripik, pengolahan madu, tuak manis dan aneka gula aren di dusun Kedondong Atas. Potensi wisata di dusun Pusuk, meliputi gardu pandang, Pusuk bike park, lahan parkir dan pertokoan serta monkey forest. Berdasarkan survey potensi awal ini, pengelola BUMDesa dapat menindaklanjuti dengan penentuan unit usaha yang sesuai dengan karakteristik wilayah ini.

Tata Kelola BUMDesa MBDPL diharapkan dapat memenuhi prinsip tatakelola, yaitu: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan (Hamdani, 2016; Suparji, 2019). Prinsip transparansi merupakan komitmen untuk memastikan ketersediaan dan keterbukaan informasi penting mengenai keadaan keuangan, pengelolaan dan kepemilikan peseroan secara akurat, jelas dan tepat waktu. Prinsip kedua adalah akuntabilitas. Prinsip ini bermakna tanggungjawab terhadap tugas dan fungsi secara jelas dan transparan yang mewujudkan terjadinya kinerja. Akuntabilitas menggambarkan adanya peran semua pihak demi tercapainya tujuan bersama. Selain bertanggungjawab secara internal, BUMDesa juga bertanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungannya, untuk memenuhi prinsip responsibilitas. Salah satunya, dengan membuat dokumen perencanaan yang pelaksanaan yang berpegang pada kehati-hatian profesional. Prinsip berikutnya adalah independensi, menggambarkan pelaksanaan fungsi organisasi sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak saling mendominasi atau bebas dari benturan kepentingan, sehingga mampu mengambil keputusan secara obyektif. Disamping itu, keputusan yang diambil dapat menjamin dapat memenuhi atau memperhatikan seluruh kepentingan, baik pemegang saham maupun pihak lainnya yang terkait, sesuai unsur kewajaran dan kesetaraan (Hamdani, 2016; Karunia & Rusyfan, 2021).

Salah satu dokumen yang dapat digunakan untuk mendukung prinsip-prinsip tatakelola perusahaan, pengurus dapat menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagaimana terlihat pada gambar 2. Dokumen ini berisikan informasi mengenai nama dan tempat usaha, nama pengurus, tugas pokok pengurus, serta informasi lainnya terkait struktur organisasi. Informasi dalam AD/ART ini, bermanfaat sebagai panduan bagi pengurus untuk bersama-sama berpartisipasi dalam mengelola BUMDesa (Astuti et al., 2019).

ANGGARAN DASAR

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) MAJU BERSAMA PUSUK LESTARI DESA PUSUK LESTARI KECAMATAN BATU LAYAR KABUPATEN LOMBOK BARAT

BAB I

PENDIRIAN, NAMA, TEMPAT / KEDUDUKAN DAN DAERAH KERJA

Pasal 1

- 1) Pemerintah Desa Pusuk Lestari Kecamatan Batu Layar mendirikan Badan Usaha Milik Desa “ **MAJU BERSAMA PUSUK LESTARI** ” dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa
- 2) Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Desa “**MAJU BERSAMA PUSUK LESTARI**”
- 3) BUM Desa “**MAJU BERSAMA PUSUK LESTARI**” berkedudukan di:
 - a. Desa : Pusuk Lestari
 - b. Kecamatan : Batu Layar
 - c. Kabupaten/Kota : Lombok Barat
- 4) Daerah kerja BUMDesa “Maju Bersama Pusuk Lestari” berada di Desa Pusuk Lestari Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat.

Gambar 2. Draft AD/ART BUMDesa.

Memenuhi salah satu unsur dari akuntabilitas, pengelola BUMDesa MBDPL dapat menyusun dokumen pedoman operasional baku. Diskusi yang sederhana dilaksanakan dalam suasana yang kekeluargaan sebagaimana tampak pada gambar 1. Berdasarkan hasil diskusi dan draft AD/ART disusun dokumen pedoman operasional baku (POB). Dokumen ini menjelaskan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing pengurus, sebagai penjabaran rinci dari AD/ART. Pengurus BUMDesa MBDPL dapat mengembangkan pedoman tersebut saat bisnis semakin berkembang, jumlah pegawai bertambah, dan seterusnya, sesuai dengan kondisi yang terjadi. Gambar 3 menguraikan draft tugas pokok dan fungsi pengurus BUMDesa berdasarkan hasil diskusi. Dengan adanya dokumen ini, pengelola BUMDesa dapat mengukur kinerja pengurus maupun pegawainya.

TUGAS POKOK			
BUMDesa Maju Bersama Pusuk Lestari	Nomor Dokumen _____	Nomor Revisi	Halaman 1 s/d 2
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	Tanggal Terbit : _____	Ditetapkan oleh : Ketua	
	Tanggal Berlaku: _____	(_____)	
Pengawas	<ol style="list-style-type: none"> Mengusulkan Rapat Umum Kepada Penasehat untuk membahas kinerja BUMDesa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali manakala ada penyimpangan pelaksanaan BUMDesa Mengusulkan rapat umum pengawas untuk: <ol style="list-style-type: none"> Pemilih dan pengangkatan pengurus Menetapkan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDes Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan operasional. Memperoleh bagian SHU tahunan yang besarnya sudah ditentukan 		
Penasehat	<ol style="list-style-type: none"> Memberi nasehat dalam pelaksanaan pengelolaan BUMDesa Melindungi BUMDesa dari hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDesa Meminta penjelasan dari pelaksana BUMDesa menyangkut permasalahan pengelolaan BUMDesa 		
Ketua BUMDesa	<ol style="list-style-type: none"> Memimpin BUMDesa Menyusun pengendalian kegiatan BUMDesa Melakukan perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga Melaporkan keadaan keuangan BUMDesa akhir tahun melalui musyawarah pertanggungjawaban desa 		
Sekretaris BUMDesa	<ol style="list-style-type: none"> Mengurus kegiatan surat menyurat dalam pengelolaan BUMDesa Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMDesa Mengurus administrasi kepegawaian Berkoordinasi dengan pengurus lainnya. 		
Bendahara BUMDesa	<ol style="list-style-type: none"> Menyusun dan mengajukan Rencana Anggaran dan Bisnis Melaksanakan administrasi pembukuan keuangan BUMDesa Berkoordinasi dengan pengurus lainnya 		

Gambar 3. Draft dokumen Tugas Pokok dan Fungsi

Melengkapi unsur transparansi dan akuntabilitas keuangan, BUMDesa menyusun dokumen kebijakan akuntansi. Dokumen ini menjelaskan nama akun, kode akun, pengelompokan pengeluaran dan penerimaan, akun yang masuk dalam kelompok neraca atau laba-rugi, serta metode pencatatan yang digunakan setiap akun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Tabel 1 memberikan sebagian penjelasan metode akuntansi yang dapat dianut oleh BUMDesa berdasarkan standar akuntansi keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) (IAI, 2016). Rancangan kebijakan ini menggunakan asumsi unit usaha yang berjalan adalah unit toko atau warung serba ada, unit pengadaan air bersih dan jasa wisata.

Tabel 1. Rancangan Kebijakan Akuntansi Terpilih

Kode	Nama Akun	Penjelasan
11100	Kas dan setara kas	Merupakan kas dan setara kas yang dimiliki oleh BUMDesa dan dicatat sebesar harga perolehan pada saat kas diterima atau kas dibayarkan atau pada saat terjadinya. Akun ini meliputi: kas yang disimpan oleh bendahara atau kasir, kas di produk tabungan suatu bank atas nama BUMDesa atau yang mewakili, serta sertifikat deposito atas nama BUMDesa atau yang mewakili.
11200	Piutang	Merupakan pinjaman pihak ketiga yang belum dilunasi. Piutang dicatat sebesar harga perolehan dan diakui pada saat terjadinya. Piutang ini meliputi: piutang dagang di unit usaha dan piutang karyawan
11300	Persediaan barang	Merupakan barang-barang yang siap untuk dijual dan barang yang dapat habis dipakai sendiri untuk kegiatan operasional. Meliputi: barang dagangan yang tersedia di unit warung BUMDesa serta alat tulis kantor untuk kegiatan operasional. Persediaan barang dicatat sebesar harga perolehannya pada saat barang dikirim oleh pihak ketiga. Untuk barang yang terjual, persediaan akan berkurang sebesar harga perolehannya pada saat barang dikirim ke pihak pembeli. Metode yang digunakan untuk mencatat arus keluar persediaan barang adalah metode "masuk pertama keluar pertama". Setiap akhir bulan dan akhir tahun, pengelola unit usaha akan melakukan perhitungan fisik dan menyesuaikannya dengan pencatatan barang.

Saat kegiatan pengabdian dilaksanakan, BUMDesa MDPL belum menyusun dokumen kebijakan akuntansi dan kode serta nama akun. Nama akun menunjukkan kejadian atau transaksi dicatat termasuk dalam unsur neraca ataukah rugi-laba (IAI, 2016; Kartikahadi et al., 2020). Kode akun digunakan untuk pemberian kode atas nama akun, yang akan membantu dalam penyusunan sistem informasi akuntansi. Kode akun juga dapat mempermudah pengelola BUMDesa untuk melakukan pengawasan atas laporan keuangan. Kebijakan akuntansi membantu pengelola BUMDesa saat menyusun laporan keuangan secara wajar. Tabel 2 menyajikan nama dan kode akun yang digunakan oleh BUMDesa.

SIMPULAN DAN SARAN

Tim pengabdian telah mendampingi pengelola BUMDesa "Maju Bersama Desa Pusuk Lestari" dalam menyusun dokumen tatakelola organisasi. Dokumen yang disusun menjadi panduan untuk penyusunan tatakelola bagi pengelola BUMDesa periode-periode selanjutnya. Draft dokumen tatakelola yang disusun meliputi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, standar prosedur operasional tugas pokok pengelola dan pegawai, pedoman kebijakan akuntansi serta bagan akun.

Salah satu kelemahan dari BUMDesa ini, kegiatan operasional BUMDesa yang belum berjalan serta tidak adanya tenaga sumberdaya manusia yang mampu memberikan pelayanan prima pada saat jam kerja atau jam pelayanan BUMDesa. Untuk kegiatan pengabdian berikutnya, tim kegiatan diharapkan bekerja sama dengan pihak Perguruan Tinggi melalui program studi atau fakultas untuk memberikan pendampingan saat pelaksanaan kegiatan operasional. Kegiatan pendampingan tersebut

dapat diselaraskan dengan kegiatan mahasiswa “Merdeka Belajar” yang dilaksanakan oleh pihak Perguruan Tinggi.

Tabel 2. Rancangan Kode dan Nama Akun

Kode	Nama Akun	Kode	Nama Akun
10000	Aset	40000	Pendapatan
11000	Aset lancar	41000	Penjualan
11100	Kas dan setara kas	41100	Penjualan barang-unit toko
11200	Piutang	41200	Pendapatan jasa-unit air bersih
11120	Kas di bank	41300	Pendapatan jasa – unit wisata
11400	Biaya dibayar dimuka	50000	Beban
11500	Aset lancar lainnya	51000	Beban umum dan administrasi
12000	Aset tidak lancar	51100	Beban pokok barang – unit toko
12100	Investasi pada entitas lain	51200	Pembelian barang dagang – unit toko
12300	Aset tetap		
12310	Tanah	52000	Beban Umum dan administrasi
12320	Bangunan	52100	Beban gaji
12340	Peralatan kantor	52200	Beban administrasi bank
12341	Akumulasi penyusutan peralatan kantor	52300	Beban listrik, air, telpon, koran dan internet
20000	Liabilitas	52400	Beban Penyusutan
21000	Liabilitas jangka pendek	52500	Beban Pemeliharaan
31000	Ekuitas	52600	Beban transportasi
31100	Modal disetor	52700	Beban kerugian
32000	Saldo laba		

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih, kami sampaikan kepada pengelola BUMDesa “Maju Bersama Pusuk Lestari”, beserta dewan pengawas yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. Ucapan terimakasih kami haturkan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram dan jajaran pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mataram, yang telah membantu dalam hal pendanaan dan kesempatan untuk bersilaturahmi dengan peserta kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi semua pihak.

DAFTAR RUJUKAN

- Arista, D. S., Vidia Ayu; Rahmawati, Labbaika Dwi Ayu; Hapsari, Andi Asri. (2021). Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pada BUMDES Banyuanyar Berkarya Desa Banyuanyar Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. *Kumawula*, 4(3), 550–556.
- Astuti, B. R. D., Rakhmawati, I., Suhaedi, W., & Nabila, D. T. D. (2019). Penguatan Good Government Badan Usaha Milik Desa: Perencanaan, Pengendalian Internal Dan Aspek Legalitas. *Prosiding PEPADU*, 1(1), 88–92.
- Atikah, S., Suhaedi, W., Rosyida, B., & Rakhmawati, I. (2019). Pelatihan Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Lombok Barat. *Abdi Insani*, 6(1), 113–113. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v6i1.181>
- Hamdani. (2016). *Good Corporate Governance: Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis*. Mitra Wacana Media.
- IAI, I. A. I. (2016). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah*. Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.

Pendampingan tatakelola Badan Usaha Milik Desa Maju bersama Pusuk Lestari kabupaten Lombok Barat

- Kartikahadi, H., Sinaga, R. U., Syamsul, M., Siregar, S. V., & Wahyuni, E. T. (2020). *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS (Ketiga)*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Karunia, R. L., & Rusyfan, Z. (2021). *Good Corporate Governance dan Komite Audit*. Zurra Infigro Media.
- Maab, M. H. W., Shadu S. ;. Atika, Zaula Rizqi; Kurniasih, Denok. (2018). Rethinking Model Bisnis Pemerintah Desa: Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Banyumas, Indonesia. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 16(1), 93–102.
- Millenium R, M., Lestari, P., Wahyu, A., Itsnaini, A. R., Pratiwi, W. A., Sukandi, A., Anjelijani, R. T., Wiradirja, A., Ramdhani, M. R., Amaliah, F. R., Putra, S. F., Wulandari, F. A., & Cahyaningtyas, S. R. (2022). *MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS KELOMPOK USAHA BERSAMA DAN KEPEDULIAN MSYARAKAT TERHADAP LINGKUNGAN DESA PUSUK LESTARI (KKN Tematik - Tidak Dipublikasikan) [Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat]*. Universitas Mataram.
- Pratiwi, M. B., & Novianty, I. (2020). Strategi Bertahan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pandemi COVID-19 pada Desa Cibodas Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. *Prosiding The 11th Industrial Research Workshop and National Seminar*, 26–27.
- Prihatin, R. B., Mulyadi, M., Suni, N. S. P., & Nurhayati, C. (Eds.). (2018). *BUMDes dan kesejahteraan masyarakat desa* (Cetakan pertama). Pusat Penelitian, Badan Keahlian, DPR RI, Bidang Kesejahteraan Sosial.
- Rido, Muh. Y., Delina, R., Lestari, Y. A., Anwar, S., Maulia, M., Birahmatih, E., Utomo, S. G., Anggara, I. D. P., Ariani, M., Maulana, A., & Atikah, S. (2019). *PENGOPTIMALISASIAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) SEBAGAI SARANA MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGENALAN POTENSI ALAM, di DesaPusuk Lestari, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat NTB (KKN Tematik - Tidak Dipublikasikan) [Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat]*. Universitas Mataram.
- Rosyadi, S., Ramadhanti, W., Kurniasih, D., Kusuma, A. S., Setyoko, P. I., & Atika, Z. R. (2021). *Pelatihan Penyusunan Rencana Bisnis untuk Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Lumbir*. 5(1), 21–26. <https://doi.org/10.30595/jppm.v5i1.6829>
- Rosyadi, S., Setyoko, P. I., Kurniasih, D., Ramadhanti, W., Kusuma, A. S., & Atika, Z. R. (2021). Penguatan Kapasitas Peran Sosial Bumdes dalam Penanggulangan Dampak Ekonomi COVID-19. *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 27–32. <https://doi.org/10.30656/jpmwp.v5i1.2554>
- Sukasmanto. (2014). *Rancang bangun bisnis dan pengelolaan BUM Desa* (S. E. Yunanto, Ed.; Cetakan pertama). Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
- Suparji, S. (2019). *Pedoman Tatakelola Badan Usaha Milik Desa* (1st ed.). UAI Press. www.uai.ac.id